

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DP3APPKB**

Alamat : Komplek Pemda II, Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul 55714,

Tlp. 0274-6460055 ; Fax. 0274-6460055

Email : dp3appkb@bantulkab.go.id

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Penyusunan Laporan Keuangan dimaksudkan :

1. Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
2. Sebagai Bahan Laporan dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2023.
3. Sebagai tolok ukur pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Adapun tujuan Penyusunan Laporan Keuangan :

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil – hasil yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mendanai seluruh kegiatan.
4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:
10. DPA – SKPD : DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 2 Januari 2023;
11. DPPA: DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 21 Februari 2023;
12. DPPA: DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 6 April 2023;
13. DPPA: DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 6 Juni 2023;
14. DPPA: DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 23 Juni 2023;
15. DPPA: DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 7 Juli 2023;
16. DPA Perubahan: DPPA/B.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 26 Oktober 2023;
17. DPPA Setelah Perubahan: DPPA/B.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 7 November 2023;
18. DPPA Setelah Perubahan: DPPA/B.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 17 November 2023;
19. DPPA Setelah Perubahan: DPPA/B.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 15 Desember 2023;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Ekonomi Makro
- Bab III Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
- Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Bantul yang mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
2. Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mewujudkan kemandirian dan partisipasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Untuk mewujudkannya, dalam pelaksanaan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul diarahkan pada tujuan tersebut diatas.

2.2. Kebijakan Keuangan

Masyarakat, maka dukungan dana APBD Kabupaten Bantul Sebagai Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan umum dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk keberhasilan tugas pokok dan fungsi tersebut.

APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 20.959.856.719,00.

APBD tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terdiri dari :

- Belanja operasi : Rp. 19.298.545.426,00
- Belanja modal : Rp. 572.531.000,00

dan dialokasikan untuk membiayai:

REALISASI ANGGARAN DINAS P3APPKB S/D 31 DESEMBER 2023

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	
				(RP)	(%)
1	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	263.887.500	263.887.500	100
1.1	2.08.02.2.0 1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.025.000	20.025.000	100
1.1.1	2.08.02.2.0 1.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.025.000	20.025.000	100
1.2	2.08.02.2.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	129.075.000	129.075.000	100
1.2.1	2.08.02.2.0 2.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	129.075.000	129.075.000	100
1.3	2.08.02.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.787.500	114.787.500	100
1.3.1	2.08.02.2.0 3.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.000.000	49.000.000	100
1.3.2	2.08.02.2.0 3.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	63.162.500	63.162.500	100
1.3.3	2.08.02.2.0 3.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.625.000	2.625.000	100
2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	950.860.570	905.400.400	95,2
2.1	2.08.03.2.0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	149.500.000	144.000.000	96,3
2.1.1	2.08.03.2.0 1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	149.500.000	144.000.000	96,3
2.2	2.08.03.2.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	626.635.570	587.925.400	93,8
2.2.1	2.08.03.2.0 2.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	390.608.070	385.265.000	98,6
2.2.2	2.08.03.2.0 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	236.027.500	202.660.400	85,9
2.3	2.08.03.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.725.000	173.475.000	99,3

2.3.1	2.08.03.2.0 3.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	174.725.000	173.475.000	99,3
3	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	68.786.620	64.961.500	94,4
3.1	2.08.05.2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.786.620	64.961.500	94,4
3.1.1	2.08.05.2.0 1.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	68.786.620	64.961.500	94,4
4	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	548.411.745	540.336.620	98,5
4.1	2.08.06.2.0 1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	139.394.140	136.069.140	97,6
4.1.1	2.08.06.2.0 1.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	139.394.140	136.069.140	97,6
4.2	2.08.06.2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	409.017.605	404.267.480	98,8
4.2.1	2.08.06.2.0 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	240.390.960	237.990.960	99
4.2.2	2.08.06.2.0 2.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.006.925	137.656.800	98,3
4.2.3	2.08.06.2.0 2.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.619.720	28.619.720	100
5	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	970.097.200	829.746.570	85,5
5.1	2.08.07.2.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	868.437.200	728.086.570	83,8
5.1.1	2.08.07.2.0 2.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	144.485.000	99.925.800	69,2
5.1.2	2.08.07.2.0 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	308.868.225	233.930.900	75,7
5.1.3	2.08.07.2.0 2.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	166.118.975	164.868.850	99,3
5.1.4	2.08.07.2.0 2.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	248.965.000	229.361.020	92,1

5.2	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000	101.660.000	100
5.2.1	2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000	101.660.000	100
6	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.955.798.039	6.646.279.236	95,6
6.1	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.394.000	104.376.500	100
6.1.1	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.394.000	94.376.500	100
6.1.2	2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100
6.2	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.820.205.478	4.611.084.826	95,7
6.2.1	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.679.788.478	4.477.402.826	95,7
6.2.2	2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.060.000	122.360.000	94,8
6.2.3	2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.357.000	11.322.000	99,7
6.3	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.135.073.427	1.072.711.902	94,5
6.3.1	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.494.200	8.494.200	100
6.3.2	2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	438.675.920	433.668.920	98,9
6.3.3	2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	15.000.000	100
6.3.4	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.088	6.500.000	100
6.3.5	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.080.000	86,7
6.3.6	2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	48.150.000	96,3
6.3.7	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	588.228.219	533.043.782	90,6
6.3.8	2.14.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.500.000	8.500.000	100
6.3.9	2.14.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17.275.000	17.275.000	100
6.4	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.102.000	9.102.000	100
6.4.1	2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	9.102.000	9.102.000	100
6.5	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.538.000	175.665.608	91,7

6.5.1	2.14.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	98.000	65,3
6.5.2	2.14.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	4.366.488	48,5
6.5.3	2.14.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.750.000	15.100.000	95,9
6.5.4	2.14.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.638.000	156.101.120	93,7
6.6	2.14.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.485.134	673.338.400	96,8
6.6.1	2.14.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.647.200	80.044.000	96,9
6.6.2	2.14.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.949.600	260.769.900	95,2
6.6.3	2.14.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	9.100.000	9.100.000	100
6.6.4	2.14.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.010.000	38.640.000	99,1
6.6.5	2.14.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290.778.334	284.784.500	97,9
7	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	494.850.000	463.892.300	93,7
7.1	2.14.02.2.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	59.850.000	55.285.000	92,4
7.1.1	2.14.02.2.0 1.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	43.050.000	43.050.000	100
7.1.2	2.14.02.2.0 1.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	16.800.000	12.235.000	72,8
7.2	2.14.02.2.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	435.000.000	408.607.300	93,9
7.2.1	2.14.02.2.0 2.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	69.500.000	68.012.500	97,9
7.2.2	2.14.02.2.0 2.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	63.950.000	99,6
7.2.3	2.14.02.2.0 2.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	139.800.000	139.800.000	100
7.2.4	2.14.02.2.0 2.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	102.000.000	77.344.800	75,8
7.2.5	2.14.02.2.0 2.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	59.500.000	59.500.000	100
8	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.712.980.045	6.240.114.800	93
8.1	2.14.03.2.0 1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.983.416.250	1.971.633.250	99,4

8.1.1	2.14.03.2.0 1.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	80.000.000	100
8.1.2	2.14.03.2.0 1.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	54.400.000	54.112.000	99,5
8.1.3	2.14.03.2.0 1.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	322.734.000	322.734.000	100
8.1.4	2.14.03.2.0 1.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	268.075.000	268.075.000	100
8.1.5	2.14.03.2.0 1.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	818.550.000	818.430.000	100
8.1.6	2.14.03.2.0 1.08	Pengendalian Program KKBPK	439.657.250	428.282.250	97,4
8.2	2.14.03.2.0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.111.924.380	1.105.438.000	99,4
8.2.1	2.14.03.2.0 2.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	24.000.000	24.000.000	100
8.2.2	2.14.03.2.0 2.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	475.617.380	471.441.000	99,1
8.2.3	2.14.03.2.0 2.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	612.307.000	609.997.000	99,6
8.3	2.14.03.2.0 3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.788.176.915	2.337.706.050	83,8
8.3.1	2.14.03.2.0 3.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	286.836.000	259.072.500	90,3
8.3.2	2.14.03.2.0 3.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.730.822.915	1.345.972.050	77,8
8.3.3	2.14.03.2.0 3.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	128.990.000	110.391.500	85,6
8.3.4	2.14.03.2.0 3.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	406.903.000	391.690.000	96,3
8.3.5	2.14.03.2.0 3.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	44.100.000	44.030.000	99,8
8.3.6	2.14.03.2.0 3.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	81.775.000	81.775.000	100
8.3.7	2.14.03.2.0 3.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	68.350.000	64.375.000	94,2
8.3.8	2.14.03.2.0 3.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	40.400.000	40.400.000	100

8.4	2.14.03.2.0 4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	829.462.500	825.337.500	99,5
8.4.1	2.14.03.2.0 4.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	42.812.500	42.812.500	100
8.4.2	2.14.03.2.0 4.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	6.225.000	69,2
8.4.3	2.14.03.2.0 4.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	757.650.000	757.650.000	100
8.4.4	2.14.03.2.0 4.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	20.000.000	18.650.000	93,3
9	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.661.870.000	3.586.542.500	97,9
9.1	2.14.04.2.0 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.515.187.500	3.469.065.000	98,7
9.1.1	2.14.04.2.0 1.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	355.800.000	98,8
9.1.2	2.14.04.2.0 1.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	68.450.000	61.200.000	89,4
9.1.3	2.14.04.2.0 1.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	226.050.000	199.665.000	88,3
9.1.4	2.14.04.2.0 1.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.797.800.000	2.791.800.000	99,8
9.1.5	2.14.04.2.0 1.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	62.887.500	60.600.000	96,4
9.2	2.14.04.2.0 2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	146.682.500	117.477.500	80,1
9.2.1	2.14.04.2.0 2.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	19.850.000	0	0

9.2.2	2.14.04.2.0 2.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.507.500	6.507.500	100
9.2.3	2.14.04.2.0 2.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	47.000.000	42.995.000	91,5
9.2.4	2.14.04.2.0 2.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	73.325.000	67.975.000	92,7
10	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	332.315.000	329.915.000	99,3
10.1	2.22.08.5.0 7	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	332.315.000	329.915.000	99,3
10.1.1	2.22.08.5.0 7.01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	332.315.000	329.915.000	99,3
Jumlah			20.959.856.719	19.871.076.426	94,8

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Indikator pencapaian target kinerja pada APBD tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	66	21,77
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah	Perangkat Daerah	45	45
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	45	45
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat	Persen	72	72

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	40	40
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan	Persen	66	66
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	27	27
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	40	40
Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 Penduduk Perempuan	0,00032	0,00037
Kegiatan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Lembaga	40	40
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	Lembaga	7	7
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	120	98
Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Layanan Tindak	Layanan	6	6

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Lembaga	40	40
Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	8	8
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan analisis dan data gender dan anak	Dokumen	1	1
Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	30	75
Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	Persen	12	12
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	20	20
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak	Lembaga	30	30
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
Sub Kegiatan Pengembangan	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	Persen	100	100
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	155	108
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6
Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	Lembaga	1	1
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	1	1

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima	Persen	38,67	54,67
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan	Desa	3	3
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Pengembangan Desa Prima Tk Kabupaten	Desa	14	14

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2023 sebesar **94,81%**. Adapun kegiatan meliputi :

REALISASI ANGGARAN DINAS P3APPKB S/D 31 DESEMBER 2023

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	
				(RP)	(%)
1	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	263.887.500	263.887.500	100
1.1	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.025.000	20.025.000	100
1.1.1	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.025.000	20.025.000	100
1.2	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	129.075.000	129.075.000	100
1.2.1	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	129.075.000	129.075.000	100
1.3	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.787.500	114.787.500	100
1.3.1	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.000.000	49.000.000	100
1.3.2	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	63.162.500	63.162.500	100
1.3.3	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.625.000	2.625.000	100
2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	950.860.570	905.400.400	95,2
2.1	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	149.500.000	144.000.000	96,3
2.1.1	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	149.500.000	144.000.000	96,3

2.2	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	626.635.570	587.925.400	93,8
2.2.1	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	390.608.070	385.265.000	98,6
2.2.2	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	236.027.500	202.660.400	85,9
2.3	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.725.000	173.475.000	99,3
2.3.1	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	174.725.000	173.475.000	99,3
3	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	68.786.620	64.961.500	94,4
3.1	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.786.620	64.961.500	94,4
3.1.1	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	68.786.620	64.961.500	94,4
4	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	548.411.745	540.336.620	98,5
4.1	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	139.394.140	136.069.140	97,6
4.1.1	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	139.394.140	136.069.140	97,6
4.2	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	409.017.605	404.267.480	98,8
4.2.1	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	240.390.960	237.990.960	99
4.2.2	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.006.925	137.656.800	98,3
4.2.3	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.619.720	28.619.720	100
5	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	970.097.200	829.746.570	85,5
5.1	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	868.437.200	728.086.570	83,8

5.1.1	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	144.485.000	99.925.800	69,2
5.1.2	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	308.868.225	233.930.900	75,7
5.1.3	2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	166.118.975	164.868.850	99,3
5.1.4	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	248.965.000	229.361.020	92,1
5.2	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000	101.660.000	100
5.2.1	2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.660.000	101.660.000	100
6	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.955.798.039	6.646.279.236	95,6
6.1	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.394.000	104.376.500	100
6.1.1	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.394.000	94.376.500	100
6.1.2	2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100
6.2	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.820.205.478	4.611.084.826	95,7
6.2.1	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.679.788.478	4.477.402.826	95,7
6.2.2	2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.060.000	122.360.000	94,8
6.2.3	2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.357.000	11.322.000	99,7
6.3	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.135.073.427	1.072.711.902	94,5
6.3.1	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.494.200	8.494.200	100
6.3.2	2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	438.675.920	433.668.920	98,9
6.3.3	2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	15.000.000	100
6.3.4	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.088	6.500.000	100
6.3.5	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.080.000	86,7
6.3.6	2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	48.150.000	96,3
6.3.7	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	588.228.219	533.043.782	90,6

6.3.8	2.14.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.500.000	8.500.000	100
6.3.9	2.14.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17.275.000	17.275.000	100
6.4	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.102.000	9.102.000	100
6.4.1	2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	9.102.000	9.102.000	100
6.5	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.538.000	175.665.608	91,7
6.5.1	2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	98.000	65,3
6.5.2	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	4.366.488	48,5
6.5.3	2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.750.000	15.100.000	95,9
6.5.4	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.638.000	156.101.120	93,7
6.6	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.485.134	673.338.400	96,8
6.6.1	2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.647.200	80.044.000	96,9
6.6.2	2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.949.600	260.769.900	95,2
6.6.3	2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	9.100.000	9.100.000	100
6.6.4	2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.010.000	38.640.000	99,1
6.6.5	2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290.778.334	284.784.500	97,9
7	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	494.850.000	463.892.300	93,7
7.1	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	59.850.000	55.285.000	92,4
7.1.1	2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	43.050.000	43.050.000	100
7.1.2	2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	16.800.000	12.235.000	72,8
7.2	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	435.000.000	408.607.300	93,9
7.2.1	2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	69.500.000	68.012.500	97,9
7.2.2	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	63.950.000	99,6
7.2.3	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	139.800.000	139.800.000	100

7.2.4	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	102.000.000	77.344.800	75,8
7.2.5	2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	59.500.000	59.500.000	100
8	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.712.980.045	6.240.114.800	93
8.1	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.983.416.250	1.971.633.250	99,4
8.1.1	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	80.000.000	100
8.1.2	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	54.400.000	54.112.000	99,5
8.1.3	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	322.734.000	322.734.000	100
8.1.4	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	268.075.000	268.075.000	100
8.1.5	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	818.550.000	818.430.000	100
8.1.6	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	439.657.250	428.282.250	97,4
8.2	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.111.924.380	1.105.438.000	99,4
8.2.1	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	24.000.000	24.000.000	100
8.2.2	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	475.617.380	471.441.000	99,1
8.2.3	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	612.307.000	609.997.000	99,6
8.3	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.788.176.915	2.337.706.050	83,8
8.3.1	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	286.836.000	259.072.500	90,3
8.3.2	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.730.822.915	1.345.972.050	77,8
8.3.3	2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	128.990.000	110.391.500	85,6
8.3.4	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	406.903.000	391.690.000	96,3
8.3.5	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	44.100.000	44.030.000	99,8

8.3.6	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	81.775.000	81.775.000	100
8.3.7	2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	68.350.000	64.375.000	94,2
8.3.8	2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	40.400.000	40.400.000	100
8.4	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	829.462.500	825.337.500	99,5
8.4.1	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	42.812.500	42.812.500	100
8.4.2	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	6.225.000	69,2
8.4.3	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	757.650.000	757.650.000	100
8.4.4	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	20.000.000	18.650.000	93,3
9	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.661.870.000	3.586.542.500	97,9
9.1	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.515.187.500	3.469.065.000	98,7
9.1.1	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	355.800.000	98,8
9.1.2	2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	68.450.000	61.200.000	89,4
9.1.3	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	226.050.000	199.665.000	88,3
9.1.4	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.797.800.000	2.791.800.000	99,8
9.1.5	2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	62.887.500	60.600.000	96,4
9.2	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	146.682.500	117.477.500	80,1

9.2.1	2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	19.850.000	0	0
9.2.2	2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.507.500	6.507.500	100
9.2.3	2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	47.000.000	42.995.000	91,5
9.2.4	2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	73.325.000	67.975.000	92,7
10	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	332.315.000	329.915.000	99,3
10.1	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	332.315.000	329.915.000	99,3
10.1.1	2.22.08.5.07.01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	332.315.000	329.915.000	99,3
Jumlah			20.959.856.719	19.871.076.426	94,8

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Secara umum, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan telah dapat direalisasikan, adapun sisa merupakan efisiensi dan sisa pengadaan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian yang ditetapkan adalah :

No.	Permasalahan
1	Minat dan kesadaran masyarakat masih rendah terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
2	Masih banyak OPD belum yang belum Menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam Program dan Keempatannya.
3	Pembiayaan DAK tidak dapat terserap karena sudah dianggarkan mitra yang lain dan juga tidak ada permintaan
4	Kurangnya pemahaman lembaga baik pemerintah maupun non, termasuk masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sehingga peran lembaga yang dimaksud belum optimal

No.	Permasalahan
1	Kesertaan Peserta KB Aktif rendah (kesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang /MKJP (IUD, Implant, MOW,MOP)
2	Sumber Daya Manusia di lini lapangan kurang maksimal dalam pencapaian program kegiatan.
3	Ketersediaan sarana dan prasarana pencatatan dan pelaporan terbatas.
4	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bangga Kencana belum maksimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul sudah berusaha untuk menerapkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten, sebagai berikut :

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

a. Kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :

- Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara Umum daerah, terdiri dari atas saldo rekening di Kas Daerah setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.
Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten yang berada di rekening Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Setara kas, antara lain berupa desposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

- Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggungjawab /dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas penerimaan Bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang pertanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan . Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :

- Biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri ;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

- Investasi Nonpermanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang , penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

- Investasi Permanen

Investasi permanent adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat social . Investasi permanent dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi permanen terdiri atas :

- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik Negara ;
- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan Negara, Pemerintah Daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diterus pinjamkan ;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga ;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan

Penyertaan modal pemerintah daerah menggambarkan jumlah yang umum. Aset dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikan 51 % atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu

d. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah, atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

- Klarifikasi aset tetap yang digunakan adalah :
- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan jaringan
- Aset tetap lainnya

- Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

e. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

1. Aset tak berwujud
2. Tagihan penjualan angsuran
3. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

f. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklarifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

g. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga

- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Utang Jangka Pendek Lainnya

h. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

i. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek .

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

j. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukan penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan penjelasan realisasi masing-masing pos pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan : nihil
- Aset Tetap : Rp. 8.308.456.970,69
- Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai : Rp. 4.647.762.826
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 14.650.782.600
 - Belanja Hibah : Rp. 0
- Belanja Modal
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 572.531.000
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 0

Adapun Neraca Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL****NERACA SKPD**

PER : 31 DESEMBER 2023

SATKER : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUB UNIT : UNIT INDUK

No	Uraian	Jumlah
1	ASET	
11	ASET LANCAR	
111	Kas dan Setara Kas	0,00
11101	Kas di Kas Daerah	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00
11106	Kas Lainnya	0,00
11107	Kas di Pengelola Dana Bergulir	0,00
11108	Kas di Bendahara Blockgrant	0,00
11109	Kas di KPU dan Panwas	0,00
113	Piutang	0,00
11301	Piutang Pajak	0,00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0,00
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0,00
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0,00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00
11305	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
1130501	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Bruto)	0,00
1130502	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
11306	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00
1130601	Piutang Pendapatan Lainnya (Bruto)	0,00
1130602	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00
114	Belanja Dibayar Dimuka	0,00
11401	Belanja Dibayar Dimuka	0,00
115	Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)	101.558.630,00
11501	Piutang Lainnya	101.558.630,00
1150101	Piutang Lainnya (Bruto)	4.761.793.631,00
1150102	Penyisihan Piutang Lainnya	(4.660.235.001,00)
116	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00
11601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00
117	Piutang Lain-lain	0,00
11701	Piutang Lain-lain	0,00
119	Persediaan	166.873.114,00
11901	Persediaan	166.873.114,00

No	Uraian	Jumlah
	JUMLAH ASET LANCAR	268.431.744,00
13	ASET TETAP	
131	Tanah	79.997.000,00
13101	Tanah	79.997.000,00
132	Peralatan dan Mesin	8.996.979.394,51
13201	Peralatan dan Mesin	8.996.979.394,51
133	Gedung dan Bangunan	7.428.698.634,00
13301	Gedung dan Bangunan	7.428.698.634,00
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.678.478,00
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.678.478,00
135	Aset Tetap Lainnya	492.857,00
13501	Aset Tetap Lainnya	492.857,00
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
137	Akumulasi Penyusutan	(8.311.389.392,69)
13701	Akumulasi Penyusutan	(8.311.389.392,69)
	JUMLAH ASET TETAP	8.308.456.970,82
15	ASET LAINNYA	
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
15201	Tagihan Jangka Panjang	0,00
153	Aset Tak Berwujud	0,00
15301	Aset Tak Berwujud	64.550.000,00
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(64.550.000,00)
154	Aset Lain-lain	0,00
15401	Aset Lain-lain	0,00
155	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00
15501	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00
	JUMLAH ASET	8.576.888.714,82
2	KEWAJIBAN	
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
21201	Utang Bunga	0,00
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
215	Utang Belanja	284.769,00
21501	Utang Belanja	284.769,00
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
21602	Utang Uang Jaminan	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	284.769,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	284.769,00
3	EKUITAS	
31	EKUITAS	
311	Ekuitas	8.576.603.945,82
	JUMLAH EKUITAS	8.576.603.945,82

No	Uraian	Jumlah
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.576.888.714,82

BANTUL, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH.
196603201996032002

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2023 jumlah pegawai sebagai berikut :

1. ASN : 33 orang
2. Non ASN : 39 orang
3. Penyuluh KB : 45 orang

Penghargaan yang diraih DP3APPKB di tahun 2023

- DP3APPKB mendapatkan Penghargaan kategori Utama pada tahun 2023



- DP3APPKB Kabupaten Bantul mendapatkan penghargaan APE Kategori Madya



REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD PADA TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PREVALENSI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK	0,45	0,032	0,43	0,365
NILAI KLA	730	715	830	888,81
NILAI RATA RATA JUMLAH ANAK DALAM KELUARGA	2,5	2,05	2,45	2,03

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan.

Bantul, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Dra. Ninik Isjitarini, Apt, MPH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196603201996032002